



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan *) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

- tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.389.352.757.498,- bertambah sejumlah Rp. 54.117.093.747,- sehingga menjadi Rp.443.469.851.245,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 301.417.732.394,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>13.629.335.606,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 315.047.068.000,- |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 389.352.757.498,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>54.117.093.747,-</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. 443.469.851.245,- |
| Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan | Rp. (128.422.783.245,-) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 102.610.025.104,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>43.312.758.141,-</u> |

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 145.922.783.245,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 14.675.000.000,-

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.825.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 17.500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 128.422.783.245,-

Sisa lebih Pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp. 145.922.783.245,-

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 4.044.264.425,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.658.217.640,-

Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 6.702.482.065,-

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 289.618.072.300,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.873.617.966,-

Jumlah dana perimbangan setelah
Perubahan Rp. 300.491.690.266,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp. 7.755.395.669,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 97.500.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 7.852.895.669,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1. Semula Rp. 700.213.500,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 133.249.998,-

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 833.463.498,-

b. Restribusi daerah

1. Semula Rp. 543.435.860,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 55.717.640,-

Jumlah restribusi daerah
setelah Perubahan Rp. 599.153.500,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 289.865.067-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 989.865.067,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 2.510.749.998,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.769.250.002,-</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 4.280.000.000,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1. Semula	Rp. 66.511.612.300,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.873.617.966,-</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 77.385.230.266,-
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp. 185.712.460.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 185.712.460.000,-
c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 37.394.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 37.394.000.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp. _____ -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp. -
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp. _____ -
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 7.755.395.669,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 7.755.395.669,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp.	-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	-
Jumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainya setelah Perubahan		Rp.	-
f. Pendapatan lainnya			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>97.500.000,-</u>	
Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan		Rp.	97.500.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| a. Belanja tidak langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 130.469.074.395,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>11.470.880.800,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan | | Rp. | 141.939.955.195,- |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 258.883.683.103,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>42.529.896.050,-</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp. | 301.529.896.050,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|---|-----|-----------------------------|------------------|
| a. Belanja pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 91.859.074.395,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>5.856.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai
setelah Perubahan | | Rp. | 97.715.074.395,- |
| b. Belanja bunga | | | |
| 1. Semula | Rp. | - | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u> </u> | - |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. | - |

c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>450.000.000,-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	450.000.000,-
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp.	4.950.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.518.000.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	9.468.000.000,-
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp.	12.440.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	12.440.000.000,-
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp.	10.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten, kota dan pemerintah desa		
1. Semula	Rp.	9.570.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.096.880.800,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	10.666.880.800,-
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	1.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.200.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	19.052.616.925,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.445.507.690,-</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	20.498.124.615,-
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.	66.747.549.865,-

2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.287.726.736,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 70.035.276.601,-
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 173.083.516.313,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>37.912.978.521,-</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 210.996.494.834,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 102.610.025.104,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>43.312.758.141,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 145.922.783.245,-
b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp. 14.675.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>2.825.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 17.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1. Semula	Rp. 102.610.025.104,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>. 43.312.758.141,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 145.922.783.245,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	2.475.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	2.825.000.000,-
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	5.300.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	12.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pembayaran utang jangka pendek pada Pemerintah Hulu Sungai Utara	Rp.	12.200.000.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan;

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 15 Oktober 2008

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR